

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Muhammad Arfah Pattenreng. 2019. Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah (Suatu Kajian Komprehensif). Makassar: Bosowa Publishing Group.
- Abdul Hamid Hakim. Mabadi Awwaliyyah. Bulan Bintang. Cet.Ke-1. Juz 1. Jakarta. 1976.
- Abuddin Nata. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004).
- Abu Zahrah. Ushul Fiqh. Mathba'ah Mukhaimar. Kairo. 1957.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Kencana. Jakarta. 2010.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia*. di Masa Lalu. Kini. dan Depan (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986).
- Amir Syarifuddin. *Hukum perkawinan islam di indonesia*. Kencana. 2006.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif. Surabaya, 1997.
- Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gama Media. Yogyakarta. 2001.
- Al-Khin, M. M., Al-Bugha, M., & Asy-Syarbaji, A. *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i (Jilid II)*. Beirut: Dar al-Qalam.1992.
- Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam* (dari Jazirah Arab sampai Indonesia). (Cet.II. Bandung:Pustaka Setia. 2007).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. PT. Karya Toha Putra. Semarang. 2010.
- Didiek Ahmad Supadie. *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*. Unissula Press. Semarang. 2015.
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakiahat*. Amzah. Jakarta. 2009.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1996).
- J. Satrio. 1991. Hukum Harta Perkawinan. (Citra Aditya Bakti. Bandung).

- Jamhur. *Sejarah Nasional dan Umum*. (Surakarta; Tiga Serangkai. 1996).
- Juhaya S. Pradja.M.A. *Perkawinan perceraian keluarga muslim*. pustaka setia. 2013.
- John Anderson. *Hukum islam di dunia modern*. alih bahasa machrun husein. (surabaya: Amarpress.1990).
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi. Penelitian Hukum Norma*. Bayu Medu. Publishing. Malang. 2009.
- Khoirudin nasution. “*persoalan mahar dan perkawinan : studi konvensional dan kontemporer*” dalam *hermenia*. vol 1 no.2 juli-desember 2002.
- Khoiruddin nasution. *islam tentang relasi suami dan istri (hukum perkawinan1)* cet 1 (yogyakarta:academia dan tazafa. 2004).
- M. Arfin Hamid. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar. 2011
- M.Rasyidi. *Keutamaan Hukum Islam. Bulan Bintang*. Rahmat Rosyadi. Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum. Jakarta. 1971.
- Mardani. *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia”*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2015.
- Majed Alrasheed. *Marriage Contracts and Property Rights in Saudi Arabia*. *Arab Law Quarterly*, 28(2), 141–158. 2014.
- Masifuk Zuhdi. *Pengantar Hukum Syariah*. (Jakarta: CV. Haji Masagung. 1990).
- Masykuri Abdillah. *Aspirasi Ummat : Antara Islamisasi dan Humanisasi*. dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin (ed).
- Mehdi, R. *The Islamization of the Law in Pakistan*. London: Routledge. 1994.
- Metode Penman Suaft. *Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta. 2010.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2014.
- Murtadha Muththahari. *Nizamu Huquq al-Mar’ah Fil Islam*
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Mukhammad Najih. *Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah. Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*. Setara Press. Malang. 2012.

- Muttaqien Dadan. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Insania Cita Pres, Yogyakarta. 2006.
- Mohd. Noor, N. *Legal Framework of Dower (Mahar) in Malaysian Family Law. Malayan Law Journal*, Vol. 3, hlm. 212. 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005.
- Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A. *Fiqh Munakahat*. CV. Karya Abadi Jaya. Semarang. 2015.
- Ratna Artha Windari. *Pengantar hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindoPersada. 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books. Yogyakarta. 2016.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Slamet Abidin Dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Cv. Pustaka Setia. Bandung. 1999.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyah, 1999
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2011.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2017.
- Soekidjo Notoatmodjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineke Cipta. 2010.
- Soejorw Soekarto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normal Suatu Tinjauan Singkat*. RajawaR Pers. Jakarta. 1990.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung : as Syamil Press & Grafika. 2001).
- W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: Pustaka Sarjana. 1982).
- Wahbah Al-zuhaili. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beriut. Cet. Ke-3. Dár al-fikr.1989.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Sumur Bandung. Bandung) . 1981.
- WJS. Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1976).

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2019.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Tesis

Diah Kumala Sari. 2022. *Analisis Yuridis Atas Hak Kepemilikan Tanah Yang Dibeli Sebelum Dibuatnya Perjanjian Kawin (Postnuptial Agreement) Pada Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.

Jurnal

Deliska Anwar. Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Pelayanan Jasa Kenotariatan Yang Belum Selesai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 143/Pdt.G/2021/Pn Mdn). *Jurnal Law of Deli Sumatera*. Volume2 Nomor 2. Universitas Sumatera Utara. 2023.

Naoval Mauladani Hartono. 2023. *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan*. *Jurnal Notarius*. Volume16 Nomor1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Sumber Internet

Annisa Istrianty dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>. *Privat Law*. (Vol. III No 2 Juli-Desember 2015).

Zulfi Diane Zaini. 2012. Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat), <https://media.neliti.com/media/publications/12289-ID-perspektif-hukum-sebagai-landasan-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-sebuah-pendek.pdf>. *Jurnal Hukum Unissula*, (Vol. XXVIII, No. 2, Desember 2012).

Peraturan Perundang-Undangan

A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan P.P.24 Tahun 1997) dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (P.P. 37 Tahun 1998)*. CV.Mandar maju. Bandung. 1999.

Ada sejumlah ayat Alquran yang berbicara tentang mahar yaitu Q.s. al-Baqarah [2]:236-237. al-Nisa'[4]:4,24 dan 25. al-Maidah[5]. dan al-Mumtahanah [60]:10.

Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Daruquthni. Kitab "an-nikah" jilid III. nomor 22.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa No. 4 Tahun 2010 tentang Mahar. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 219 K/AG/2009.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107 K/AG/2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 304 K/AG/2002.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 519 K/AG/2007.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/AG/2015.